

Abstrak

Hibah merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang harus dikelola serta dicatat penerimaan dan pengeluarannya sesuai peraturan yang berlaku. Pengelolaan dan pencatatan hibah mempunyai beberapa urgensi penting terkait akuntabilitas dan pencatatan yang akurat. Berdasarkan hal tersebut, salah satu tugas dan fungsi KPPN adalah melakukan pencatatan hibah langsung barang dan jasa pada satuan kerjanya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meninjau kesesuaian proses bisnis pengelolaan hibah barang dan jasa, implementasi dan penyajiannya pada Laporan Keuangan UAKPA serta mengetahui kendala dan solusi terkait pengelolaan hibah barang dan jasa pada satuan kerja lingkup KPPN Tebing Tinggi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan dengan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan. Metode studi kepustakaan digunakan untuk membandingkan data dengan ketentuan perundang-undangan khususnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK/05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah sementara studi lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPN Tebing Tinggi telah melaksanakan pengesahan hibah barang sesuai prosedur dan aturan yang berlaku tetapi terkadang masih terdapat kendala yaitu satuan kerja terlambat dalam melakukan pengesahan hibah barang dan penolakan pada pengesahan hibah. Selain itu, penyajian Laporan Keuangan UAKPA pada satuan kerja KPPN Tebing Tinggi juga sudah dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 Tentang Sistem Akuntansi Hibah.

Kata kunci: Implementasi, Sistem Akuntansi Pemerintahan, Hibah barang dan jasa, Laporan Keuangan UAKPA

Abstract

Grants are a source of state revenue which must be managed and recorded receipts and expenditures in accordance with applicable regulations. Management and recording of grants has several important concerns regarding accountability and accurate recording. Based on this, one of the tasks and functions of KPPN is to record direct grants of goods and services to its work units. Therefore, this research aims to review the suitability of the business process for managing goods and services grants, its implementation and presentation in the UAKPA Financial Report and to find out the obstacles and solutions related to managing goods and services grants in work units within the KPPN Tebing Tinggi scope. This research used a qualitative descriptive method using literature study and field study techniques. The literature study method was used to compare data with statutory provisions, especially Minister of Finance Regulation Number 99/PMK/05/2017 concerning Grant Management Administration, while field studies were carried out by conducting interviews. The results of the research show that KPPN Tebing Tinggi has carried out the ratification of goods grants according to applicable procedures and rules, but sometimes there are still obstacles, namely the work unit is late in ratifying goods grants and rejection of grant ratification. Apart from that, the presentation of the UAKPA Financial Report to the KPPN Tebing Tinggi work unit has also been carried out in accordance with Minister of Finance Regulation Number 201/PMK.05/2021 concerning the Grant Accounting System.

Keywords: Implementation, Government Accounting System, Grants of goods and services, UAKPA Financial Reports